

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Paradigma reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam sector pendidikan. Menurut Bastian (2007:52), dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga membaik. Sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat mengupayakan melalui dana dari masyarakat. Pengelolaan dana dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui untuk apa dana sekolah itu dibelanjakan.

Selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekarang laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh setiap sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari realisasi anggaran, laporan surplus defisit dan

siswa. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Selanjutnya Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan. Atau dengan kata lain, pelaporan keuangan sekolah harus dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke sekolah tersebut.

Sesuai dengan pasal 51 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini akan mendorong pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Sesuai dengan ketentuan dalam MBS bahwa pengelolaan keuangan sekolah juga harus menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Permendikbud RI (2014:2) mengemukakan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Program BOS oleh pemerintah ditunjukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih mengena. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien.

Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarananya yang masih kurang dan benar-benar perlu. Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana BOS tidak digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang perlu. Sebab selama ini, kita sering menghamburkan uang negara untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Jadi terkesan (walaupun benar) kita adalah bangsa yang senang menghabiskan anggaran. Jika kebutuhan sebuah sekolah akan sarana fisik seperti gedung telah terpenuhi, BOS bisa dialihkan untuk menambah buku-buku bacaan di perpustakaan untuk peningkatan budaya membaca dan pengetahuan siswa. Selama ini, pembangunan sering diartikan sebagai sebuah usaha pembuatan sarana fisik semata. Karena itu, yang terjadi adalah pembangunan fisik berjalan baik, namun pembangunan mental dan cara

berpikir masyarakat cenderung berjalan di tempat. Dengan demikian, usaha memerdekakan masyarakat dari kebodohan selalu gagal.

Dalam pengelolaan dana BOS, pihak sekolah harus didukung dengan prinsip *good governance*. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *good governance* kian populer. *Good governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Damiri, 2005).

Good governance adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam *good governance* pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok bahasannya. Prinsip *good governance* yang digunakan dalam pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1). Dengan menerapkan prinsip *good governance*, diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi sebuah sekolah sehingga tingkat efektivitas terhadap pengelolaan keuangan sekolah juga mengalami peningkatan.

Selain *Good Governance*, anggaran berbasis kinerja juga mampu menjadi factor dalam mempengaruhi pengelolaan Dana BOS. Sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran, dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif di dalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (*outcome*). Kemudian melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Namun, pada implementasinya masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya terkait pengendalian anggaran yang belum efektif. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggara keuangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, khususnya terkait biaya pendidikan. Hal tersebut berdampak pada realisasi anggaran BOS yang belum tersalur secara maksimal. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggarannya telah diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana BOS. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait pengelolaan Dana BOS tersebut.

Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup

masyarakat luas. Hal ini didukung dengan diaturnya UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yakni Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana 3 pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, dan keadilan (Fauzan, 2014). Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Tetapi dalam praktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS. Menurut penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) oleh Febri Diansyah dalam (Fauzan, 2014), secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satunya

adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Permasalahan lain penyebab penyimpangan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, pihak sekolah kurang tepat waktu dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis.

. Menegenai masalah pengelolaan dana BOS ini kita melihat bagaimana pengaruh *good governance* dan anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut. Karena keberhasilan dari pengelolaan dana BOS tersebut dapat kita ukur dari bagaimana penyaluran dan penggunaannya.

Adapun studi empiris terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Liza Fajarningtyas, Muslimin dan Dr. Abdul Kahar (2016) meneliti mengenai, pengaruh anggaran berbasis kinerja dan *good governance* terhadap kinerja *value for money* (Survey Pada Pemerintah Daerah Kota Palu). Hasil menunjukkan bahwa: 1) penerapan penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai untuk kinerja uang 2) penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*; 3) penerapan *good governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai untuk kinerja uang; dan 4) implementasi penganggaran berbasis kinerja memiliki

pengaruh tidak langsung pada nilai untuk kinerja uang melalui *good governance*.

2. Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo (2016) meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu perencanaan anggaran (PA), pelaksanaan anggaran (IA) dan tanggung jawab anggaran (PJA) berpengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas institusi pemerintah.
3. Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf dan Yunaita Rachmawati (2012) meneliti tentang pengaruh *good governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari penerapan *good governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik. Diharapkan temuan ini dapat menjadi perhatian bagi para penyelenggara pemerintahan daerah mengenai pentingnya penerapan *good governance* di lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian layanan publik.
4. Mandang Gabriel Anton, Jantje J. Tinangon dan Inggriani Elim (2016) meneliti tentang penerapan anggaran berbasis kinerja untuk menunjang akuntabilitas publik pada badan lingkungan hidup kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan

untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.

5. Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono (2014) meneliti tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Hasil penelitian dari ketujuh prinsip *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* antara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.
6. Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017) meneliti tentang pengaruh *good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan *good governance* secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan aparatur pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. *Good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sinergi antara sistem pengendalian internal pemerintah dalam pencapaian kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

7. Rocky Krisna Gandara, (2018). meneliti tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung).
8. Fauzan, (2014). Menelii tentang Pengaruh *Good Governance* terhadap Pengelolaan Dana BOS. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif

dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS.

9. Isfan Pratama. (2016). Meneliti tentang Analisis Pengaruh Prinsip *Good Governance* Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah” (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta).
10. Regina, (2015). meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *Good School Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah. pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru.
11. Ebrahim Mohammed Al-Matari (2014), *The Effect of the Fund Management and Good Governance: A Proposed Research Framework. this study provides comprehensive oversights on the relationship between Fund Management and Good Governance.*
12. Qiang CHENG (2015), dengan judul *Fund Management and Performance Based Budgeting. The results whether effective fund management has implications on performance based budgeting.*
13. Kamau Caroline Njeri (2014), dengan judul *The effect of Fund Management on financial performance of manufacturing firms in Kenya. The statistical results from the regression analysis show that there is a positive relationship between Fund Management and financial performance of manufacturing firms in Kenya*
14. Muhammad Javaid (2014), dengan judul *Effect of Good Governance on Fund Management in an Institution of Higher Education In Pakistan. The*

study established is significant relationship between good governance and fund management.

15. Noraini Shamsuddin, 2014. *The Effect of good governance Toward fund management Effectiveness. This paper concludes that, good governance may influence fund management effectiveness of higher learning institutions and it needs to be proven empirically by field work study.*
16. Rahel Bekele Worku, 2017. *Role Of Good Governance on Performance of Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise. The result revealed that Good Governance contributed only 31% variation on financial performance. The descriptive result shows there is weak good governance in the organization*
17. Olga Bubilek. 2016. *Importance of good governance and fund management in an organization. The findings of this research show that both the theory and the case company assume good governance and fund management as important.*
18. Nelius Wangul Muchiri. 2017. *Good Governance and financial performance of public institutions in Kenya: A case study of Kenya Meat Commission. The researcher found that the relationship between the good governance function existence and financial performance at the KMC was insignificant. That is, existence of good governance does not influence the profitability and return on investment*
19. Kaziba Abdul Mpaata. 2015. *The Effect of Good Governance on the Performance based budgeting of a Public Hospital in Uganda. The study*

reveals that good governance has significant influence on the performance based budgeting in public hospitals.

20. Silvi Yulia (2016), Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi *Vol. 3. No. 2. Juli 2013 Hal. 206-220* Program Magister Akuntansi Unsyiah Meneliti tentang “Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Liza Fajarningtyas, Muslimin dan Dr. Abdul Kahar (2016) survey pada pemerintah daerah kota Palu	Variabel bebas : Anggaran berbasis kinerja dan Good Governance	Tempat penelitian Desain penelitian	penerapan penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai untuk kinerja uang 2) penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>good governance</i> ; 3) penerapan <i>good governance</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai untuk kinerja uang; dan 4) implementasi penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh tidak langsung pada nilai untuk kinerja uang melalui <i>good governance</i> .	e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016 hlm 109-117 ISSN:2302-2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Seto Wibisono, Ikhsan Budi Riharjo (2016) penelitian pada pemerintah kota Surabaya	Variabel bebas : Anggaran berbasis Kinerja	Tempat penelitian Desain penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu perencanaan anggaran (PA), pelaksanaan anggaran (IA) dan tanggung jawab anggaran (PJA) berpengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas institusi pemerintah.	e-ISSN 2460-0585 vol-5, no 9 (2016)
3	Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf dan Yunaita Rachmawati (2012)	Variabel bebas : <i>Good Governance</i>	Tempat penelitian Desain penelitian	adanya pengaruh positif dari penerapan <i>good governance</i> terhadap kualitas pemberian layanan publik. Diharapkan temuan ini dapat menjadi perhatian bagi para penyelenggara pemerintahan daerah mengenai pentingnya penerapan <i>good governance</i> di lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian layanan publik.	Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015 ISSN : 1693-0827
4	Mandang Gabriel Anton, Jantje J. Tinangon dan Inggriani Elim (2016) penelitian di kota Manado	Variabel bebas : Anggaran Berbasis Kinerja	Tempat penelitian Desain penelitian	Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.	Jurnal EMBA Vol.4 No. 3 September 2016, Hal. 553-563 ISSN 2303-1174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono (2014)	Variabel bebas : <i>Good governance</i>	Tempat penelitian Desain penelitian	Dari ketujuh prinsip <i>good governance</i> dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip <i>good governance</i> .	JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)
6	Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017)	Variabel bebas : <i>Good Governance</i>	Tempat penelitian Desain penelitian	penelitian menunjukkan <i>good governance</i> secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, <i>Good governance</i> , penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Vol-1 No 2 Desember 2017 ISSN 23376686 ISSN 23383321
7	Rocky Krisna Gandara, (2018).	Variabel bebas : anggaran berbasis Kinerja Variabel Terikat: Pengelolaan Keuangan	Tempat penelitian Desain penelitian	penelitian menunjukkan pengaruh signifikan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.	Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Vol-1 No 2 Desember 2017 ISSN 23376686 ISSN 23383321

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Fauzan, (2014).	Variabel bebas : <i>Good Governance</i> Variabel Terikat : Pengelolaan Dana BOS	Tempat penelitian Desain penelitian	Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.	Jurnal Ilmiah Vol-2 No 6 April 2014 ISSN 1326-2356
9	Isfan Pratama. (2016).	Variabel bebas : <i>Good Governance</i> Variabel Terikat : Pengelolaan Dana BOS	Tempat penelitian Desain penelitian	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Prinsip <i>Good Governance terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah</i>	Jurnal Ilmiah Vol-1 No 4 September 2016 ISSN 2338-3321
10	Regina, (2015)	Variabel bebas : <i>Good Governance</i> Variabel Terikat : Pengelolaan Dana BOS	Tempat penelitian Desain penelitian	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan <i>Good School Governance</i> berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah. pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru	Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Vol-1 No 2 Desember 2017 ISSN 23376686 ISSNL 23383321
11.	Ebrahim Mohammed Al-Matari (2014)	Variabel Independen adalah <i>Good Governance</i> Variabel Dependen: Pengelolaan Dana	Variabel independen adalah Anggaran berbasis kinerja	<i>this study provides comprehensive oversights on the relationship between Fund Management and Good Governance</i>	<i>International Review of Management and Marketing</i> Vol. 4, No. 1, 2014, pp.34-41 ISSN: 2146-4405
12	Qiang CHENG (2015)	Variabel Independen adalah Anggaran berbasis kinerja dan pengelolaan dana	Variabel independen adalah <i>Good Governance</i>	<i>The results whether effective fund management has implications on performance based budgeting</i>	<i>Research Collection School Of Accountancy</i> ISSN: 2488-9849 Vol. 2, Issue 8 (August 2015)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Kamau Caroline Njeri (2014)	Variabel dependen: pengelolaan Dana	Variabel dependen adalah <i>Good Governance</i> dan anggaran berbasis kinerja	<i>The statistical results from the regression analysis show that there is a positive relationship between fund management and financial performance of manufacturing firms in Kenya</i>	<i>Department of Finance and Accounting, School of Business, University of Nairobi</i> ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137
14.	Muhammad Javaid (2014)	Variabel Independen adalah <i>Good Governance</i> Variable dependen: Pengelolaan dana	Objek Penelitian: <i>Institution of Higher Education in Pakistan</i>	<i>The study established is significant relationship between good governance and fund management</i>	<i>Al-Madinah International University Faculty of Finance</i> ISSN 2117-1244 Vol.1 No.4 September
15.	Noraini Shamsuddin, (2014)	Variabel Independen adalah <i>Good Governance</i> Variable dependen: Pengelolaan dana	Variabel independen : anggaran berbasis kinerja	<i>This paper concludes that, good governance may influence fund management system effectiveness of higher learning institutions and it needs to be proven empirically by field work study.</i>	<i>E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah 26-27 May 2014 (E-ISBN: 978-983-3048-92-2)</i>
16	Rahel Bekele Worku, (2017)	Variabel Independen adalah <i>Good Governance</i>	Variabel dependen: pengelolaan dana bos Objek Penelitian: <i>Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise</i>	<i>The result revealed that good governance contributed only 31% variation on financial performance. The descriptive result shows there is weak good governance in the organization.</i>	<i>etd.aau.edu.et/ISSN/123456789/14277 Vol.2. Vol. 11(8), pp. 168-174, 28 April, 2017</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Olga Bubilek. (2016)	Variabel Independen adalah <i>Good Governance</i> Variable dependen: pengelolaan dana	Variabel independen : anggaran berbasis kinerja	<i>The findings of this research show that both the theory and the case company assume good governance and fund management as important</i>	<i>International Business Degree Thesis Bachelor of Business Administration 2017.</i>
18	Nelius Wangul Muchiri. (2017)	Variabel Independen adalah <i>good governance</i>	Variabel dependen: pengelolaan Dana BOS Objek Penelitian: <i>A case study of Kenya Meat Commission</i>	<i>The researcher found that the relationship between the good governance existence and financial performance at the KMC was insignificant.</i>	<i>ISSN 1993-8233 Vol.1 No.4 September 2014</i>
19.	Kaziba Abdul Mpaata. (2015).	Variabel Independen adalah <i>good governance and performance based budgeting</i>	Variabel dependen: pengelolaan Dana BOS Objek Penelitian: <i>public hospitals</i>	<i>The study reveals that internal audit function has significant influence on the good governance of the performance based budgeting in public hospitals</i>	<i>International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015)</i>
20	Silvi Yulia (2016)	Variabel Independen nya anggaran berbasis kinerja. Variabel Dependen nya pengelolaan dana BOS	Variabel independen: <i>good governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BOS	Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2. Juli 2013 Hal. 206-220 Program Magister Akuntansi Unsyiah

Syahmega Elisya Resmana: Pengaruh *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Dana BOS, (survey pada SDLB, SMPLB, SMALB di SLB Negeri Garut Kota) Dimana Variabel X_1 – nya *Good Governance*, Variabel X_2 – nya Anggaran Berbasis Kinerja, dan Variabel Y – nya Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibuat dalam bentuk usulan penelitian dengan judul “**PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS** (Survey pada SDLB, SMPLB, SMALB di SLB Negeri Garut Kota) ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana *Good Governance*, Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota.
2. Bagaimana pengaruh *Good Governance* terhadap Anggaran Berbasis Kinerja pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota.
3. Bagaimana pengaruh *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Pengelolaan Dana BOS pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui *Good Governance*, Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengelolaan Dana BOS pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Anggaran Berbasis Kinerja pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* dan anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan dana BOS secara simultan.
3. Untuk Mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Pengelolaan Dana BOS pada SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLBN Garut Kota.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dapat memberikan gambaran kepada pemerintah tentang kebutuhan sekolah akan suatu sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan Dana BOS. Serta dapat memberikan pertimbangan mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi akuntansi.

3. Bagi kalangan akademis dan dunia penelitian

Untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada SLB Negeri Garut Kota.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019, penulis dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Akuntansi.

Tabel 1.2
Matriks Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember 2018				Januari – April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
	Minggu Ke-				Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan dan pengajuan izin	■																			
Pengajuan judul		■	■	■																
Penyusunan UP					■	■	■	■												
Bimbingan									■	■	■	■								
Seminar UP													■							
Revisi														■						
Pengolahan data dan penyusunan skripsi														■	■	■				
Bimbingan																	■	■	■	■
Sidang Skripsi dan Komprehensif																				■